

**DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA  
MEMULIHKAN SEKTOR PARIWISATA INTERNASIONAL DI  
MASA PANDEMI COVID-19**

**NANDA AYU CINDI PATIKASARI**

Universitas Abdurrab

Nandaayucp18@univrab.ac.id

***Abstrak***

Meluasnya virus Corona di Indonesia, tentunya memberikan dampak yang begitu signifikan di berbagai macam sektor, salah satunya sektor pariwisata. Penurunan terhadap sektor pariwisata karena adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kebijakan tersebut berupa penutupan akses keluar masuk antar pulau, antar benua, dan antar negara. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk memberi gambaran bagaimana diplomasi publik Indonesia dapat menangani penurunan sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif dan mengumpulkan data sekunder melalui teknik studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Diplomasi Publik. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata dengan cara Diplomasi Publik. Yang mana Diplomasi Publik memberikan peran yang signifikan dalam mengatasi permasalahan sektor pariwisata. Beberapa langkah mempromosikan pariwisata Indonesia ke mancanegara telah dilakukan dan terdapat pula pilar-pilar yang membantu Diplomasi Publik dalam menangani permasalahan sektor pariwisata dimasa pandemi Covid-19.

Keywords: Indonesia, Pariwisata, Covid-19, Diplomasi Publik

## PENDAHULUAN

Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan suatu perekonomian negara, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan suatu produktivitas terhadap negara (Jeff & Pasternak, 2004). Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang strategis, yang mana hal ini dimanfaatkan sebagai pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian dari adanya pembangunan Nasional. Pembangunan kepariwisataan ini memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang mana pada akhirnya dapat meningkatkan suatu kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Pandemi Covid-19 telah menyebar ke seluruh negara di dunia. Hal ini sangat membahayakan kesehatan manusia, yang mana dapat menginfeksi jutaan umat manusia di dunia. Peyebaran virus corona ini disinyair melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung alat mulut pada saat batuk atau bersin. Dengan bertambahnya jumlah masyarakat dunia yang terinfeksi sehingga menyebabkan berbagai kebijakan yang dibuat dalam mengurangi efek domino agar dapat memutus penyebaran virus ini, yang mana hal itu berupa Social Distancing (pembatasan sosial), Lockdown (karantina wilayah), serta Wrok From Home (bekerja/beraktivitas dari rumah). (Sutrisnawati, 2020).

Covid-19 adalah wabah global yang berdampak buruk pada dimensi manusia dan sosial. Setelah menyebar dari Cina, pandemi meluas dengan cepat ke 210 negara termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 adalah kejutan besar bagi ekonomi global termasuk Indonesia. Ekonomi mengalami penurunan setidaknya untuk paruh pertama tahun ini dan mungkin lebih lama jika tindakan penahanan wabah Covid-19 tidak efektif. Pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, dalam negeri, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen dan dampak negatif di sektor-sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata. Dampak wabah Covid-19 tidak diragukan lagi akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata, perusahaan kecil dan menengah diperkirakan akan sangat terpengaruh. (Elistia, 2020). Pandemi Covid-19 dipastikan akan membawa perubahan besar terhadap minat wisatawan. Diperkirakan wisatawan nantinya akan lebih mengedepankan aspek keamanan dan kesehatan. Perubahan perilaku dalam berwisata harus dapat diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Perilaku wisatawan setelah pandemi berlalu memiliki ciri baru. Wisatawan akan lebih memilih wisata alam dengan waktu tempuh yang singkat. Keamanan dan kebersihan menjadi faktor utama yang menentukan pemilihan destinasi wisata. Selain itu, riwayat suatu negara dengan jumlah penderita yang banyak terkena Corona kemungkinan akan berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah wisatawan. Hal ini memberikan implikasi teori baru bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan destinasi. (Wachyuni & Kusumaningrum, 2020).

Terdapat adanya permasalahan dalam sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19, maka diplomasi publik memberikan upaya pemulihan terhadap permasalahan tersebut. Yang mana secara umum, bahwa diplomasi publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan publik mancanegara (Foreign public). Tujuannya meliputi dua hal, yaitu untuk mempengaruhi perilaku dari negara bersangkutan dan memfasilitasinya. Karenanya, soft power menjadi perangkat dalam pelaksanaan diplomasi publik. Soft power sendiri merupakan kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan menarik perhatian atau mempengaruhi pihak lain agar mau mengadopsi tujuan-tujuan negara-negara yang menggunakan soft power tersebut. (Hennida, 2009).

Pada dasar diplomasi berkenaan dengan bagaimana membangun komunikasi untuk mempengaruhi kebijakan negara sasaran sehingga sesuai dengan keinginan negara pelaku diplomasi publik. Cara yang biasa ditempuh adalah dengan mendekati publik asing dari negara sasaran, lalu membentuk opini publik asing, dan berharap agar publik asing tersebut dapat mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintahannya ke negara pelaku diplomasi publik. (Putra, 2019). Diplomasi publik juga sangat berhubungan dengan pembentukan citra suatu negara. Citra dapat dinyatakan secara singkat sebagai "gambaran dalam benak kita". Maka dengan demikian bahwa hal ini merupakan hal yang ideal apabila citra suatu negara yang dibangun oleh diplomasi publik dapat memunculkan suatu kepercayaan negara lain tentang potensi dan prestasi negara yang bersangkutan sehingga dapat memberikan keuntungan kepada negara lain apabila melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Di samping itu pula juga memberikan keuntungan bagi negara yang bersangkutan. (Ma'mun, 2012).

## **STUDI LITERATUR**

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Joshua Busby Tahun 2020 dengan judul "What International Relations Tells Us about COVID-19". Penelitian menggunakan teori peran individu, teori atribut negara dan teori struktural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan internasional tentang Covid-19. Hasil dari penelitian ini berupa deklarasi PHEIC, dengan tujuan yaitu secara selektif atau jarang menggunakan pembatasan perjalanan dan sebagai gantinya menggunakan penyakit pengawasan dalam membasmi epidemik sebelum menimbulkan resiko bagi komunitas global. kesalahpahaman publik tentang peran WHO yang tidak dapat memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan. Dalam hal ini dapat mendukung secara teknis dan secara operasional, yang mana merupakan praktek terbaik, yang memiliki berbagai informasi, peta jalan, dan memantau tanggapan negara. (Busby, 2020).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mary Mostafanezhad, Joseph M Cheer dan Harnng Luh Sin Tahun 2020 dengan judul "Geopolitical anxieties of tourism: (Im)mobilities of the COVID-19 pandemic". Penelitian menggunakan teori Geopolitik.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memperkuat dan menantang sejarah imajinasi geopolitik yang berakar dan berbasis yang mana tidak pernah diselesaikan, melainkan berupa negosiasi hal ini merupakan cara baru dimasa Covid-19. Hasil dari penelitian ini adalah dalam gudang permainan menyalahkan geopolitik, penguji, pendorong struktural, dan konsekuensi dari dampak pandemi Covid-19 akan dikabulkan oleh narasi yang berakar secara historis yang dipersenjantai melalui imajinasi wisata setempat. Menavigasi masa depan yang tidak pasti dari mobilitas global, para sarjana dapat mempertimbangkan bagaimana pariwisata menghadapi tantangan dan penguatan narasi geopolitik dan apa artinya pariwisata geoekonomi memperhitungkan dengan apa yang baru saat ini terkena luka ketidaksetraan struktural. (Cheer, 2020).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Chin Chiang Lee dan Mei Ping Chen Tahun 2020 dengan judul “ The impact of COVID-19 on the travel and leisure industry returns: Some international evidence”. Penelitian ini menggunakan teori Empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak Covid-19 terhadap perubahan distribusi industri perjalanan dan rekreasi di 65 negara melalui model rekreasi kuantil yang menggunakan data harian dari Desember 2019 hingga Mei 2020 untuk memberikan bukti awal dari panel negara. Hasil dari penelitian ini adalah dampak Covid-19 pada perjalanan dan industri rekreasi jauh lebih merusak dibandingkan dampak dari SARS hampir dua dekade lebih awal. Pendekatan OLS hanya mengidentifikasi kondisi rata-rata, jadi kami menggunakan XR untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang apakah Covid-19 memengaruhi industri perjalanan dan rekreasi di seluruh distorsi bersyarat dari pengembalian industri. Dibandingkan efek kasus terkonfirmasi Covid-19, kematian akibat Covid-19 sangat memberikan dampak negatif yang lebih besar pada pengembalian industri perjalanan dan rekreasi. Mengeksplorasi hubungan antara wabah Covid-19 dan perjalanan dan pengembalian industri rekreasi karena dampak krisis pada industri perjalanan dan rekreasi mungkin bervariasi lintas seperti maskapai penerbangan, restoran, perjudian, layanan rekreasi atau lainnya. (Lee& Chen, 2020).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh A. George Assaf, Florian Kock, dan Mike Tsionas Tahun 2021 dengan judul “Tourism During and After COVID-19: An Expert- Informed Agenda for Future Research”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan agenda pariwisata paska Covid-19. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kesepakatan umum bahwa area berikutnya akan membutuhkan perhatian sebagai industri sebaiknya memposisikan dirinya pasca Covid-19: perilaku konsumen, permintaan dan pemodelan kinerja, peramalan, tujuan dan manajemen fasilitas, teknologi informasi dan kualitas kehidupan. Industri pariwisata pasti akan bangkit kembali, tetapi Covid-19 memberikan dampak jangka panjang dari krisis ini. Destinasi dan hotel juga harus memahami hal baru dalam keseimbangan, yang mana pariwisata mungkin akan menetap dan mampu memposisikan diri baik di era pasca Covid-19, sehingga hal ini membuka jalan bagi daya saing dan pertumbuhan

lebih lanjut, Menyesuaikan strategi baru untuk mempercepat proses pemulihan industri dan mempersiapkan untuk masa depan. (Assaf, et.al.: 2021).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Chris Gibson Tahun 2021 dengan judul "Theorising Tourism In Crisis: Writing and Relating in Place". Penelitian ini menggunakan teori Krsisi dan Pariwisata. Penelitian ini bertujuan bahwa pariwisata berteori melampaui krisis yang mana harus berevolusi secara literatif dari etnografi. Hasil dari penelitian ini adalah upaya untuk membangun kembali kehidupan dan mata pencaharian setelah kebakaran hal ini terhambat karena adanya pembatasan pandemi. Setahun setelah kebakaran, banyak yang kehilangan tempat tinggal. Upaya yang dilakukan antara komunitas lokal, kelompok seni dan kesejahteraan untuk mengumpulkan sumber daya jika tidak ada bantuan pemerintah menjadi kacau karena pengecualian pandemi adalah di antara ribuan penduduk yang masih mengalami dampak keberlanjutan kebakaran hutan, yang mana mencoba untuk menyembuhkan dan menangani konsekuensi dari hilangnya pendapatan, properti dan PTSD. Banyak yang berjuang dengan pengecualian pandemi, anak-anak homeschooling, kehilangan pekerjaan dan rawan merindukan liburan, tetapi tidak menemukan jeda. Saat pembangunan kembali dan regenerasi di Australia perlahan lahan meningkat setelah kebakaran dan penguncian pandemi, pandangan dunia pribumi sudah membuka jenis lain percakapan, di antara penduduk setempat untuk berkabung menyembuhkan, tetapi juga orang-orang yang berkunjung. (Gibson, 2021)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana penelitian Kualitatif merupakan metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, dan juga termasuk dalam ilmu pendidikan. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang mana menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000). Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa terdapat karakteristik dari penelitian kualitatif yang berupa: (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif (Bagdan dan Biklen, 1982).

## **PEMBAHASAN**

### **Kejalasan dan Rasionalitas Kebijakan**

Dengan meluasnya penyebaran virus Covid-19 ini sangat berdampak terhadap semua sektor, salah satunya yaitu sektor pariwisata. Yang mana Covid-19 ini menyebabkan hilangnya nyawa dan pekerjaan serta terdapat kemerosotan terhadap kegiatan ekonomi secara umum. Efek yang sering muncul dari Covid-19 ini yaitu virus ini sangat cepat menyebar. Berbagai kebiasaan dibuat untuk mencegah dan menekankan penyebaran terhadap Covid-19. Pemerintah mengeluarkan

pemberitahuan untuk melakukan pembatasan jarak dan larangan yang bersifat keramaian serta lockdown juga dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Melihat dengan banyaknya dampak dari Covid-19 ini, maka dilakukan upaya-upaya dalam memulihkan sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19. Pemulihan sektor pariwisata ini dapat dilakukan dengan penanganan jangka pendek, menengah, panjang. (Sutrisnawati, et.al.:2020).

Penanganan jangka pendek dilakukan dengan memberikan dukungan finansial atau stimulasi terhadap biaya operasional dan para pelaku industri pariwisata. Terdapat solusi lain yaitu dengan mengoptimalkan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), penguatan terhadap regulasi bagi wisatawan mancanegara, serta inovasi produk digital. Pendapat dari Azril Azhari, Ketua Ikatan Cendekia Pariwisata Indonesia (ICPI) yang mana ia berpendapat bahwa dalam memulihkan sektor pariwisata yang harus disiapkan terlebih dahulu yaitu perbaikan lima kelemahan daya saing pariwisata. Hal itu, mulai dari kebersihan, keamanan, service infrastruktur, kesiapan hingga sustain ability. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Nia Nascaya mengatakan “ dalam mengemalkan kepercayaan wisatawan merupakan hal yang dianggap kunci sukses terhadap pelaksanaan upaya pemulihan sektor pariwisata”. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Wisnutama juga menuturkan “ bahwa dalam pemulihan sektor pariwisata pihaknya akan fokus menggarap wisatawan nusantara (Wisnus) lebih dahulu dalam memulihkan sektor pariwisata usai terdampak berat pandemi Covid-19”. (Sutrisnawati, et.al.:2020).

Dalam hal ini terdapat pula terdapat upaya pemulihan sektor pariwisata oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, yang mana terdapat tiga strategi yang diterapkan dalam mempercepat pemulihan pariwisata. (Anggarini, 2021). Strategi tersebut disampaikan Sandiaga Uno dalam rapat utama sebagai menteri saat serah terima jabatan. Adapaun tiga strategi tersebut yaitu:

Inovasi, yang mana merupakan sebuah proses utama yang memiliki suatu perubahan yang mendasar pada saat ini. Hal itu dilakukan pemerintah dalam mengupayakan destinasi prioritas. Inovasi sendiri harus dilakukan dalam segi infrastruktur, budaya, kuliner hingga fashion dan semua hal itu harus berkaitan dengan pariwisata juga ekonomi kreatif.

Adaptasi merupakan hal yang wajib diterapkan, hal itu dilakukan agar semua pihak dapat eradaptasi dengan adanya pandemi Covid-19, salah satunya yaitu dengan terus meningkatkan penerapan CHSE (Cleanliness (Kebersihan), Helath (Kesehatan, Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah Lingkungan)).

Kolaborasi harus dilakukan semua pihak, yang mana mereka harus dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan sektor pariwisata, hal ini dikarenakan jutaan lapangan pekerjaan terdampak pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, maka hal inilah yang harus diperjuangkan agar lapangan pekerjaan dapat terbuka seluas-luasnya dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Para pelaku UMKM dan pekerja sektor informal di industri pariwisata harus dapat memiliki kesempatan dalam meningkatkan usahanya melalui sistem perdagangan elektronik (online) dan melakukan kemitraan. Hal ini merupakan suatu peluang dalam meningkatnya transaksi online dalam pandemi Covid-19. Dengan adanya hal ini maka pekerja informal dan UMKM di sektor pariwisata dapat bertahan selama pandemi, serta dapat melakukan peningkatan kelembagaan yaitu dapat membangun jaringan atau terbangun dalam sebuah kemitraan. Pemanfaatan teknologi sudah menjadi sebuah keharusan, dengan meningkatnya layanan online sangat penting bagi UMKM dan sektor industri informal, hal ini berguna untuk promosi, komunikasi, proses penjualan barang/jasa dengan marketplace dan website/aplikasi. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya dalam penyelamatan sektor UMKM, dan sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan bantuan subsidi dan relaksasi pinjaman. (Anggarini, 2021). Hal tersebut dilakukan pemerintah agar para pekerja informal dan UMKM dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19, yang mana hal ini perlu dilakukan yaitu meningkatkan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi. Adanya kebijakan sektor industri pariwisata yaitu:

1. Tersedianya dana APBN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar RP 298,5 miliar.
2. Pemerintah telah memberikan insentif kepada agen wisata, penerbangan dan juga insentif seperti promosi pariwisata, family trip dan influencer.
3. Tersedianya potongan harga tiket domestik yang diberikan rata-rata yaitu 51,44% untuk 25% dari kapasitas seat penerbangan satu perjalanan, yang mana meliputi: diskon sebesar 30% untuk kouta 25% seats di penerbangan ke 10 tujuan wisata. Hal ini berlaku selama 3 bulan yaitu Maret, April, dan Mei 2020. Kebijakan ini berlangsung selama 3 bulan dan diskon tersebut untuk tujuan penerbangan domestik dengan destinasi wisata yaitu Denpasar, Batam, Manado, Yogyakarta, Labuan Bajo. Belitung, dan Malang.
4. Adanya insentif usulan dari asosiasi, yang mana apabila adanya 10 destinasi wisata maka tarif pajak hotel dan restoran akan dinolkan.
5. Memberikan hibah kepada Pemda akibat adanya penurunan tarif pajak hotel dan hotel di daerah sebesar Rp 3,3 triliun.
6. Terdapat APBN di bidang sektor pariwisata sebesar Rp 147 miliar, yang mana pada saat ini belum dapat digunakan oleh Pemda. Rencananya akan dikonversi menjadi hiah ke daerah, sehingga dapat meningkatkan perkembangan pariwisata.
7. Dengan melakukan promosi terhadap wisatawan dalam domestik.

8. Mempromosikan event musik dan olahraga yang sudah ada di dalam negeri, dan juga dilakukan upaya untuk menarik potensi MICE dan event internasional agar dapat diselenggarakan di Indonesia.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) tersebut bertujuan untuk menjaga kegiatan mobilitas selama pandemi Covid-19 melalui pengetatan jumlah wisatawan, hingga memberlakukan administrasi perjalanan khusus di era pandemi Covid-19. Dengan demikian, para wisatawan yang ingin berkunjung atau melakukan perjalanan, sebaiknya telah mempunyai beberapa persyaratan administrasi seperti adanya sertifikat vaksin, aplikasi e-HAC, aplikasi PeduliLindungi, dan juga perlu memperhatikan CHSE. (Kemenparekraf, 2021).

Adapun penjelasan dari masing-masing persyaratan administrasi tersebut yaitu: **e-HAC**

Electronic Health Alert Card (e-HAC) merupakan kartu kewaspadaan kesehatan yang mana diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan. Aplikasi ini digunakan untuk memonitor secara cepat terhadap calon penumpang yang datang ke Indonesia, baik itu melalui gerbang pelabuhan udara maupun laut. Wisatawan juga diwajibkan mengisi e-HAC jika ingin bepergian menggunakan pesawat maupun kapal laut selama pandemi Covid-19. Maka dengan adanya e-HAC ini membantu pemerintah dapat mengontrol penyebaran Covid-19 yang mana kemungkinan dibawa oleh penumpang. (Kemenparekraf, 2021).

### **PeduliLindungi**

Wisatawan nusantara maupun mancanegara wajib mengunduh aplikasi pelacak Covid-19 yaitu PeduliLindungi sebelum masuk ke Indonesia. Dengan adanya aplikasi ini membantu pemerintah dalam melindungi wisatawan dan pelaku di setiap destinasi wisata. PeduliLindungi adalah aplikasi yang berkolaborasi dengan BNPB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Siber dan Sandi Negara dalam segi perlindungan keamanan siber. Kerjasama juga dilakukan dengan Telkom Indonesia hal ini dilakukan untuk mengembangkan aplikasi. Maka dengan adanya aplikasi ini membuat masyarakat dapat mendeteksi zona merah di suatu destinasi wisata dan dapat menginformasikan apabila ternyata berinteraksi dengan suspect Covid-19, dengan demikian hal ini dapat membantu pelacakan. (Kemenparekraf, 2021).

### **Srtifikat Vaksin**

Sejak adanya pandemi, banyak perubahan yang terjadi pada setiap aspek kehidupan masyarakat, sehingga kepentingan setiap negara pun berubah. Kepentingan yang diprioritaskan adalah upaya dalam memberantas Covid-19 dan mencegah dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 tersebut. dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara, ditemukan pentingnya kerjasama global dalam memperkuat suatu infrastruktur dan tata kelola kesehatan,



ketahanan ekonomi, dan pentingnya multilateralisme. Maka dari itu, diplomasi Indonesia harus menuju kearah yang lebih agresif, adaptif, dan gesit agar dapat terus berkontribusi dalam perubahan global dalam melawan pandemi Covid-19. Pada Januari, 2021, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan arah prioritas diplomasi untuk tahun 2021 yang mana salah satunya berupa “Membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional atau jaminan kesehatan nasional”. Urgensi Indonesia dalam pemberantasan pandemi di dukung dengan keadaan Covid-19 yang tidak teratasi dengan baik dan juga jumlah penduduk yang telah divaksin masih rendah dengan total hanya 5.2% dari total populasi yang sudah divaksin secara lengkap. (Margono, et.al.:2020).

Pandemi Covid-19 menyebar di 200 negara di dunia. Hal ini kemudian mendorong terjadinya diplomasi vaksin antara aktor-aktor negara. Pandemi Covid-19 secara jelas mempromosikan kedadaran multilateral bahwa pandemi ini harus diselesaikan secara bersama-sama, saling bekerja sama dan gotong royong. World Health Organization (WHO) membentuk wadah aliansi yaitu Covid-19 Vaccine Global Access (COVAX) yang mana beranggotakan 183 negara dalam upaya merespon perlawanan terhadap wabah. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) bergerak cepat setelah Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global pada akhir 2019, dengan membentuk wadah kolaboratif yang disebut COVAX, bersama GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) dan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations). Wadah kolaboratif ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan pembuatan vaksin Covid-19, serta menjamin akses yang adil dan merata bagi setiap negara. (Muhamin, et.al.:2021).

Melalui pencarian tersebut, perusahaan pengembangan vaksin dari Tiongkok menjadi salah satu yang pertama bekerja sama dengan Indonesia, dimana perusahaan Sinovac Biotech Ltd. Berkolaborasi bersama PT. Biofarma, seperti dengan diadakannya uji klinis serta manufaktur vaksin. Biofarma juga turut mendapatkan akses prioritas terhadap 40 juta dosis vaksin Sinovac sebelum Maret 2021, yakni pemesanan terbesar bagi perusahaan vaksin Tiongkok, yakni sebanyak 1/3nya. Bahkan per Mei 2021, 9 dari 11 tahap kedatangan vaksin Indonesia merupakan vaksin dari Tiongkok. Kedatangan tersebut pertama dimulai pada tanggal 6 Desember 2020 ketika Indonesia menerima sebanyak 1.2 juta dosis vaksin jadi Sinovac. Sejak itu, Indonesia telah menerima 3.982.400 vaksin jadi Sinovac dan Sinopharm dari Tiongkok, ditambah pula dengan 65.500.00 bahan baku vaksin Sinovac. Indonesia termasuk ke dalam kelompok Advanced Market Commitment yang berarti Indonesia menerima jatah vaksin dari World Health Organization (WHO) sebanyak 20% dari total populasi, namun dalam rangka percepatan vaksin jumlah ini tidaklah cukup. (Margono, et.al.:2020).

World Helath Organization (WHO) menetapkan bahwa efikasi vaksin yang layak edar minimal adalah 50%. Hasil efikasi vaksin Sinovac dari Tiongkok berbeda di setiap negara. Di Indonesia, hasil efikasi vaksin Sinovac dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebesar 65%. Namun angka ini cukup rendah

dibandingkan dengan vaksin lainnya seperti Pfizer yang efikasinya mencapai 95%, Moderna yang mencapai 94% dan Astrazeneca sebesar 70%. Selain itu banyak pihak yang meragukan efikasi vaksin Sinovac karena hanya terdapat sedikit data yang dipublikasi kepada publik, sedangkan produsen vaksin lainnya seperti Moderna, Pfizer, dan Astrazeneca secara terbuka mempublikasikan hasil uji klinis dalam jurnal terbuka. (Margono, et.al.:2020).

Terdapat enam jenis vaksin yang dapat digunakan dalam vaksin nasional. Kecualisatu jenis vaksin produk Biofarma. Sedangkan lima vaksin Covid-19 lainnya diimpor dari luar negeri. Berikut adalah daftar lima perusahaan yang memasok vaksin Covid-19 di Indonesia yaitu:

1. Sinovac dari China
2. Sinopharm dari China
3. Astrazeneca dari Inggris
4. Moderna dari Amerika
5. Pfizer Inc dan BioNtech, Amerika Serikat-Jerman

Pemerintah memberlakukan persyaratan khusus terhadap wisatawan yang ingin masuk ke Indonesia harus menunjukkan sertifikat vaksin selain surat negatif PCR. Penyesuaian kebijakan ini telah dilakukan di beberapa negara, hal ini diambil semata-mata untuk memastikan keamanan bagi seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh destinasi wisata. (Kemenparekraf, 2021).

### **CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment).**

Sejak Maret 2021 lalu, selain vaksin pemerintah juga menerapkan protokol kesehatan yang berbasis CHSE. Langkah ini tidak dapat dipisahkan dari usahapemerintah dalam mendorong keselamatan seluruh pihak. Hal ini juga berguna untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan terhadap keamanan suatu destinasi wisata. Wisatawan dapat melihat para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah tersertifikasi CHSE melalui website. Dengan demikian harapannya yaitu agar upaya-upaya ini dapat berjalan dengan baik dan secara paralel tetap dapat memantu suatu industri kreatif tetap bergeliat di tengah-tengah pandemi. Sehingga saat pandemi telah usai industri kreatif telah siap di datangi banyak wisatawan seperti sedia kala. (Kemenparekraf, 2021).

Dengan adanya sertifikat CHSE, kini dapat merencanakan liburan ataupun travelling jadi tidak hanya nyaman akan tetapi juga aman. Mitra-mitra Traveloka CleanPartners telah berkomitmen dalam menjalankan pedoman dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan otoritas setempat, termasuk CHSE, sehingga keamanan dan kenyamanan dalam melakukan perjalanan sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Terdapat pula Traveloka CleanFlight dan Traveloka CleanTrip dalam memilih transportasi, atau Traveloka CleanAccommodation untuk hotel, villa dan pilihan akomodasi lainnya, hingga Traveloka CleanDining dan Traveloka

CleanXperience untuk berbagi wahana rekreasi, atraksi, kulineran, dan lainnya. (Yohannes, 2021).

### **Jaringan dan Kerjasama**

Dalam menanggapi situasi perekonomian yang semakin terpuruk, pemerintah sejatinya telah berupaya melakukan langkah-langkah dalam menyelamatkan dan mempercepat laju ekonomi Indonesia dalam sektor pariwisata. Hal tersebut terlihat dari new normal tourism yang dibuka di beberapa tempat, akan tetapi tetap menaati protokol kesehatan yang berlaku sesuai dengan Keputusan Menteri 02/KB/2020 dan KB/1/UM.04.00/M-K/2020 yang mana disahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (Maharani & Mahalika, 2020).

Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri mengatakan "bahwa kerjasama antarnegara dalam penanganan Covid-19 ini merupakan sebuah keharusan, hal itu dilakukan untuk mengeksplorasi cara-cara yang lebih inovatif dalam meningkatkan sebuah kerjasama antara negara-negara dengan bahan baku, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap pandemi Covid-19 ini". Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat dalam memperkuat suatu kerjasama, hal tersebut dilakukan dengan bertukar informasi dan pengembangan riset. Negara-negara Uni Eropa sendiri menyebut diri mereka sebagai Tim Eropa dalam penanganan Covid-19 yang mana menganggarkan 36 miliar Euro atau sebesar Rp 627 triliun untuk negara mitra mereka yang memiliki sistem kesehatan dan ekonomi yang rentan. (Saputro, 2020). Dalam bidang ekonomi, setidaknya terdapat tiga aspek yang bisa melibatkan kerjasama antara bangsa yaitu:

### **Dukungan Finansial**

Yang mana kita sadari bahwa Covid-19 ini merupakan yang tidak terduga, yang telah menyebabkan tekanan tambahan pada anggaran nasional di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, terdapat tambahan pengeluaran dalam mengatasi pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan telah memperkirakan defisit anggaran yang akan melebar melampaui batas tiga persen yang biasanya diberlakukan setiap tahun anggaran. Dalam hal ini pula bahwa Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden yang menyatakan defisit APBN 2020 yang mana diperkirakan mencapai Rp 1,03 kuadriliun (US\$ 73,4 miliar) atau sekitar 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini berarti defisit lebih dari dua kali lipat dari batas defisit yang biasanya. Permasalahan lainnya yaitu jumlah pendapatan negara juga turun akibat aktivitas produksi dan perdagangan yang berkurang selama pandemi. Yang mana paruh pertama tahun ini, misalnya, penerimaan pajak pemerintah hanya mencapai Rp531,8 triliun atau turun 12% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. (Saputro, 2020).

Pelemahan ekonomi yang signifikan akibat Covid-19 telah mendorong langkah agresif otoritas dunia. Selain adanya langkah kebijakan untuk memperkuat sektor kesehatan, otoritas juga menaruh perhatian terhadap upaya untuk mengatasi

dampak keterpurukan ekonomi dengan meluncurkan berbagai stimulasi. Sasaran kebijakan juga sangat luas mulai dari rumah tangga, korporasi, UMKM, bahkan pemerintah daerah, serta menyasar berbagai sektor ekonomi. Berbagai lembaga seperti IMF, World Bank, ASEAN juga menyerukan pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Tekanan terhadap pasar keuangan dan perekonomian juga mendapat repons yang agresif dari otoritas moneter. Kebijakan diarahkan untuk menjaga price stability, menjamin berjalannya pasar keuangan, dan memastikan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Langkah yang dilakukan meliputi pemangkasan suku bunga, pembelian surat berharga, intervensi di pasar uang, mencegah capital flows, dan menjalin swap arrangement. Kebijakan penurunan suku bunga dilakukan dengan cukup agresif pasca merembaknya Covid-19 (Suksmonohadi & Indira, 2020).

Berbagai bantuan bilateral pun menjadi salah satu alternatif yang dapat menambah defisit tersebut. berkaitan dengan hal tersebut, maka beberapa negara menunjukkan niatnya untuk memberikan fasilitas keuangan kepada Indonesia. Adanya dukungan mereka akan meningkatkan kapasitas Indonesia dalam menangani beban tambahan selama pemulihan ekonomi. (Saputro, 2020). Hingga Juni 2020, pemerintah akhirnya mendapatkan dukungan finansial dari negara lain sebanyak US\$1,8 miliar. Jepang, misalnya mereka baru-baru ini menyampaikan dukungan keuangan sebesar 50 miliar yen atau setara dengan Rp6,9 triliun untuk membantu upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan menjaga kinerja perekonomian. Pinjaman tersebut memiliki bunga sebesar 0,01% dengan lama pinjaman 15 tahun. Akan tetapi bantuan utang luar negeri tersebut memiliki potensi risiko, maka dalam hal ini, pemerintah tetap berhati-hati dalam mengambil bantuan luar negeri dan apabila mengambil bantuan tersebut, sebaiknya mengambil yang minim risiko.

### **Bantuan Teknis**

Dalam penanganan program pemulihan ekonomi membutuhkan keterlibatan yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan utama, hal ini tidak hanya dari dalam negeri saja, akan tetapi juga dari luar negeri. Dengan mengingat banyaknya ragam kepentingan dari pemangku kepentingan dan dampak dari kebijakan yang diambil terhadap program pemulihan, maka diperlukannya suatu pembelajaran atas pengalaman terhadap negara lain dalam memprediksi suatu kebijakan tersebut berdampak positif atau negatif pada pemulihan ekonomi. Beberapa negara telah melakukan program pemulihan dan melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan dapat menjadi sebuah acuan yang baik bagi kita dalam mengembangkan langkah-langkah terhadap pemulihan ekonomi yang tepat secara waktu maupun sasaran. Misalnya, Australia telah membagikan pengalamannya kepada Indonesia dalam mengembangkan suatu kebijakan dan program untuk memulai kembali operasi bisnis serta merangsang ekonomi. Dalam sebuah pertemuan secara daring, anggota parlemen Australia telah menjelaskan kebijakan pemulihan ekonomi, salah satunya dengan memiliki dua alokasi dan

internal dalam tingkat nasional dan engara bagian agar distribusi dana menjadi lebih cepat. (Saputro, 2020).

Australia juga berbagi cara dalam membuat rumusan kebijakan fiskal, hal ini guna mendukung kegiatan ekonomi pasca lockdown. Pemerintah Australia merespon Covid-19 yang mana masuk ke negaranya sejak 25 Januari 2020 lalu dengan menyiapkan tiga paket ekonomi senilai A\$260 miliar yang mana setara dengan Rp2.783 triliun atau 13,3% dari Produk Domestik Bruto negaranya. Paket ekonomi yang pertama dilakukan yaitu untuk mendukung investasi dunia usaha dan membayar stimulasi di beberapa wilayah tertentu. Paket ekonomi yang kedua difokuskan untuk mendukung rumah tangga dan menyiapkan langkah-langkah dalam memastikan sebuah aliran kredit yang berkelanjutan. Sementara paket ekonomi ketiga dialokasikan untuk program yang mana bertujuan untuk mendukung dunia usaha dan menekankan seminimal terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Adanya langkah-langkah yang diambil Australia mirip dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mana memiliki anggaran sebesar Rp677,2 Triliun, hal ini dialokasikan untuk kesehatan, perlindungan sosial, insentif dunia usaha, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi serta Kemneterian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sekali lagi, tidak ada satu pun negara yang tahu persis formula yang tepat untuk mencegah Covid-19 ini. Akan tetapi, berbagai iformasi dan pengalaman serta kerjasama antar negara lain diperlukan untuk memperkaya pengetahuan, hal ini guna untuk mengambil sebuah tindakan dalam pemulihan yang lebih tepat (Saputro, 2020).

### **Diplomasi Ekonomi**

Situasi akibat pandemi Covid-19 membuat Indonesia membutuhkan strategi dalam menjaga arus lalu lintas perdagangan dan investasi baik domestik maupun inetrnasional. Dengan kata lain, Indonesia perlu untuk membuat strategi baru diplomasi ekonominya sebagai instrumen dalam meningkatkan perdagangan dan investasi internasional. Kementerian Luar Negeri (2005) menyatakan “Diplomasi ekonomi telah memberikan keuntungan politisi bagi Indonesia di tingkat Internasional. Keuntungan politisi tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi”. (Nabila, 2021).

Dalam proses pemulihan ekonomi, perlu adanya promosi terhadap kepentingan ekonomi di luar negeri, terutama kepada negara mitra yang memiliki hubungan erat di bidang perdagangan, keuangan, investasi dan pariwisata. Hal ini dikarenakan mereka memiliki semua potensi yang dapat berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian dengan berbagai cara. Menurut pakat Hubungan Internasional asal Inggris, Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock “Diplomasi ekonomi bekerja sangat luas dari Kementerian Luar Negeri”. Contohnya saja Kementerian Luar Negeri aru-baru ini bekerja dengan Bank Indonesia hal ini dilakukan untuk menciptakan persepsi positif terhadap perekonomian RI guna mendorong investor dan perdagangan Indonesia. Dengan adanya kerjasama antar negara memberikan semangat kebersamaan dalam mengirimkan pesan yang kuat,

yang mana bahwa kita memiliki teman baik, hal tersebut tidak hanya masa damai, akan tetapi masa krisis juga. (Saputro, 2020).

## **KESIMPULAN**

Pariwisata merupakan sektor yang penting bagi perekonomian suatu negara, salah satunya Indonesia. Akan tetapi dengan adanya virus Covid-19 dibelahan dunia membuat sektor pariwisata semakin menurun. Yang mana berdasarkan data (WHO, 2020) bahwa virus Corona merupakan virus yang dapat menyerang baik manusia maupun hewan. Melihat banyaknya penurunan di berbagai sektor akibat pandemi Covid-19 ini. Maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) memiliki tujuan dalam menjaga suatu kegiatan selama masa pandemi Covid-19. Yang mana bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia sebaiknya memiliki persyaratan administrasi yang mana berupa sertifikat vaksin, aplikasi e-HAC, aplikasi PeduliLindung, dan juga perlu memperhatikan CHSE. Sehingga diplomasi publik juga memberikan peran yang dapat membangkitkan kembali sektor pariwisata Indonesia.

Dengan memperkuat suatu diplomasi ekonomi, maka diplomasi publik memberikan promosi dan peluang kerjasama ekonomi, yang mana melibatkan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta, hal ini dengan tujuan untuk mempromosikan sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Maka dengan demikian diplomasi publik juga menggunakan tujuh pilar terhadap pemulihan sektor pariwisata Indonesia, yang mana hal ini berupa Koordinasi kebijakan pada tatanan nasional, Konsistensi kebijakan, Sasaran, Media, Konsistensi dan rasionalitas kebijakan, Jaringan dan kerjasama, serta Kepercayaan dan pemahaman komitmen Indonesia dalam memulihkan sektor pariwisata.

## **REFERENSI**

- Almuttaqi, A. I. (2020). Kekacauan Respons Terhadap Covid-19 di Indonesia.
- Anggraini, D. T. (2020). Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid-19. *Jurnal Pariwisata*, *Viol 8 No 1*.
- Arita, S. M. (2016). Sistem Informasi Pariwisata Sumatera Utara Khusus Kabupaten Toba Samosir Berbasis Web.  
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22339>.
- Assaf, A. G. K, F., & T, M. (2021). Tourism during and after Covid-19: An Expert-informed Agenda for Future Research. *Journals*. Sagepu.com/home/jtr.  
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00472875211017237>.
- Bayu, D. I. & A. (2020). Ralat Jubir Presiden, Pratikno: Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Mudik. <https://katadata.co.id/berita/2020/04/02/ralat-jubir-presiden-pratikno-pemerintah-imbau-masyarakat-tak-mudik>.

- Azizi, A. W. L, E., & Y, T. (2021). Pengembangan Pariwisata Dalam Menyongsong New Normal. *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol 4 No 2.
- Aziz, M. S. & W, M. A. (2020). Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, Vol 46 No 2.
- Busby, J. (2020). What International Relations Tells Us About Covid-19. <https://www.e-ir.info/pdf/83161>.
- Cutlip, S. M, C, A. H., & B, G. M. (2016). *Effective Public Relations Edisi Kesembilan*.
- Detik.com. (2020). Istana: Mudik oleh Tapi Wajib Isolasi mandiri dan Bestatus ODP. <https://news.detik.com/berita/d-4962231/istana-mudik-boleh-tapi-wajib-isolasi-mandiri-dan-berstatus-odp>.
- Dwina, I. (2020). Melemahnya Ekonomi Indonesia Pada Sektor pariwisata Akibat Dampak Dari Pandemi Covid-19. <http://osf.io/preprints/socarxiv/8e27t>.
- Gibson, C. (2020). Theorising Tourism In Crisis: Writing and Relating in Place. *Journals.sagepub.com/home/tou*, Vol 21 No 1.
- Tiongkok di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Sentris Edisi Khusus Diplomasi*.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pt Raya Grafindo Persada.
- Mawardi, I. (2020). Ini Daftar 37 Pernyataan Blunder Pemerintah Soal Corona Versi LP3ES.